KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1						
DIRECTORAL SERVERAL FACAR			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 1 4 3 5 6 9 3 6 6 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : DENNY JEFFRY ROTINSULU									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	5	21-402-01		14.855.000	14.855.000	0	15	2.228.250	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8	TOTAL STATE OF THE								
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
Nomor: Tanggal dd mm yyyy									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2	Nama Instar	nsi Pemerintah :	RUM	AH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI K	ALIMANTAN	ITIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4	Tanggal : 1 1 dd 0 5 mm			2 0 2 2 yyyy			_		
C.5	Nama Penan	Penandatangan : RIANDY							
C.6	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.								
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa c	lokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

7G28KB74